



EDISI IV 2009

*Warta Lengkap Seputar Perwakilan Yogyakarta***DARI REDAKSI!!!****BELUM BERAKHIR!!!**

Pertengahan bulan Juni para auditor menyelesaikan tugas akhir pemeriksaan LKPD TA.2008. Hal ini ditandai dengan penyerahan LHP kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun semua itu belum berakhir....., ini baru langkah awal dari sebuah perjalanan panjang, yang belum terlihat ujungnya. Kenapa demikian? Setelah hasil pemeriksaan diserahkan ke Dewan, temuan-temuan pemeriksaan tersebut akan menjadi konsumsi publik, baik masyarakat, pers, maupun aparat pemerintah yang lain. Terbukti, sehari setelah penyerahan LHP, mayoritas media nasional dan lokal menyorot hasil pemeriksaan BPK. Ada pemberitaan positif maupun negatif atas hasil jerih payah institusi ini. Hal ini cukup membuat kantor perwakilan kerja ekstra memilah dan menganalisa berbagai pemberitaan tersebut.

DPRD Provinsi DIY menjadi pihak perdana yang melakukan konfirmasi/konsultasi, diikuti DPRD Kulonprogo, dan bukan mustahil BPK sebagai lembaga pemeriksa akan selalu menjadi "senjata pamungkas" permintaan pemberian keterangan atas temuan-temuan yang berlanjut ke proses hukum, entah satu, dua, atau lima tahun yang akan datang. Siapkah kita?? Dont thinks "why" but lets think "How"?? (gk)

DAFTAR ISI

- Penyerahan LHP Prov. DIY (1)
- Penyerahan LHP Kab/Kota (2)
 - Konsultasi DPRD DIY (2)
 - Konsultasi DPRD Kulonprogo (3)
- Evaluasi Kinerja dan Analisa Jabatan (3)
- Inhouse Training Pemeriksaan Dana Gempa (3)
- Renungan, Pertandingan Pesahabatan (4)

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PROVINSI DIY

BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY (LHP) Tahun Anggaran 2008. LHP tersebut memuat tiga laporan, yaitu Laporan Keuangan yang memuat opini BPK, LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta LHP atas Pengendalian Intern. Kegiatan yang disiarkan langsung oleh TVRI Yogya ini dilaksanakan dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD DIY, Sabtu (13/6).

Kami memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tegas Kepala Perwakilan, **Sumardi** dalam sambutannya. Lebih jauh disampaikan bahwa pengecualian atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut meliputi; nilai aset tetap senilai Rp2,99 Triliun dan Piutang Pajak sebesar Rp28,7 Miliar. Selain

itu, diungkapkan pula temuan pemeriksaan atas kepatuhan dan pengendalian intern berikut rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pejabat yang berkompeten.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan LHP oleh Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD Provinsi DIY. Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur DIY, **Sri Sultan Hamengku Buwono X**, Wakil Gubernur, **Sri Paku Alam IX**, Anggota DPRD, Muspida, dan Kepala Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY. Sedangkan dari BPK-RI selain oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, **Nelson Humiras Halomoan, SE.,M.Acc, CFE**, Kepala Sekretariat, **Eddy Suyatno, SE.,MM**, Kepala Balai Diklat, **Suprayogi, SE.,MM.,MPd**, serta didampingi oleh Tim Audit. (gk)

BPK BERIKAN OPINI WDP ATAS LKPD KABUPATEN/KOTA

BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, Sleman, serta Kota Yogyakarta TA 2008. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan, **Sumardi** dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota kepada para Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Ruang Auditorium Perwakilan, Jumat (12/6).

Lebih lanjut **Sumardi** menyampaikan bahwa pengecualian atas kewajaran penyajian LKPD Kabupaten/Kota tersebut meliputi Nilai

Aset tetap, Nilai Investasi Non Permanen, serta Saldo Utang Jangka Pendek. Selain hal itu, diungkapkan juga beberapa temuan pemeriksaan atas kepatuhan dan temuan pemeriksaan pengendalian intern berikut rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pejabat yang berkompeten.

Kegiatan penyerahan LHP yang dilakukan secara bersamaan untuk seluruh Kabupaten/Kota ini adalah kali pertama dilaksanakan Perwakilan Provinsi DIY. Hal tersebut cukup mendapat respon positif dari masing-



masing entitas dan DPRD Kabupaten/Kota, karena kegiatan ini dapat semakin mendorong entitas untuk bersaing secara sehat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain Kepala Perwakilan dan Ketua DPRD, turut hadir pula dalam acara tersebut para Bupati dan para pejabat struktural di lingkungan Perwakilan Provinsi DIY. (g k)



Senin (22/6), Perwakilan Provinsi DIY mendapatkan kunjungan kerja segenap jajaran Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi DIY. Kunjungan kerja tersebut berkenaan dengan permohonan konsultasi LHP atas LKPD Provinsi DIY TA 2008 yang telah diserahkan BPK sebelumnya dalam rapat sidang paripurna istimewa DPRD 13 Mei yang lalu.

Adisucipto, kelebihan pembayaran biaya asuransi penumpang dan biaya terminal pengelolaan Bus Trans Jogja oleh PT JTT, pengelolaan aset daerah yang selama 4 tahun terakhir selalu menjadi kualifikasi BPK serta penempatan rekening penjaminan pinjaman UMKM yang tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah diangkat dalam pembahasan yang berlang-

Acara yang bertempat di auditorium lantai II ini diawali oleh sambutan Kepala Perwakilan BPK, **Sumardi,SH**, dilanjutkan dengan pembahasan lebih dari 20 pertanyaan yang diajukan oleh pihak DPRD. Berbagai permasalahan mengenai pen-

KONSULTASI DPRD ATAS LHP BPK PROV. DIY



dapatan parkir Bandara

sung cair selama hampir 3 jam tersebut.

Atas penjelasan yang diberikan secara langsung baik oleh Kepala Perwakilan, Kasub Auditorat serta Ketua tim pemeriksa Provinsi DIY, DPRD Provinsi DIY menyatakan puas. DPRD juga mengharapkan adanya audit investigasi dan pemeriksaan ikutan lain dari BPK terkait beberapa permasalahan yang cukup krusial. Ke depan diharapkan kerjasama semacam ini dapat berlanjut dan dapat terus ditingkatkan oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan harapan tata kelola keuangan Negara yang lebih transparan dan akuntabel. (A p)

KONSULTASI DPRD KULON PROGO

DPRD Kulon Progo mengadakan kunjungan kerja dan konsultasi ke Perwakilan Provinsi DIY, Senin (29/6). Konsultasi tersebut dilaksanakan terkait dengan LHP atas LKPD Kabupaten Kulonprogo



hasil pemeriksaan diantaranya tentang Aset tetap. Selain itu, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kewenangannya dalam mendorong

yang telah diserahkan BPK pada Jumat (12/6). Rombongan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD, Panitia Anggaran, serta Sekreatariat Dewan tersebut diterima Kepala Perwakilan, **Sumardi** di ruang auditorium gedung R. Soerasno.

Terimakasih dan apresiasi terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Demikian ujar Ketua DPRD Kulonprogo, **Drs.H. Kasdiyono** mengawali pembicaraan. Kemudian pembahasan berlanjut ke

pemerintah kabupaten untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta konsekuensi hukum jika entitas terlambat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Auditorat, **Nelson Humiras HS, SE.,M.Acc, CFE**, Kepala Sekretariat, **Eddy Suyatno, SE.,MM**, Kepala Seksi DIY II, **Riyanto, SE,Ak**, serta didampingi Tim Pemeriksa. (gk)

EVALUASI KINERJA DAN ANALISA JABATAN

Rabu (17/6) Para Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Provinsi DIY mengadakan rapat Pemetaan Pola Hubungan Kerja Eselon II dengan Eselon III dan Eselon III dengan Eselon IV.



Kegiatan yang mengambil tempat di ruang sidang lantai II ini dipandu oleh Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Biro SDM, **Sulung Setyo A, SE.Ak.,MM** dan Kepala Sub Bagian Remunerasi, **Santi Elsanti, SE.Ak.,MM**.

Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kegiatan inventarisasi beban kerja para pejabat struktural selama sepekan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan pembagian beban tugas masing-masing pos jabatan yang ada di Perwakilan BPK RI. (gk)

Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Demikian salah satu persyaratan bagi pemeriksa BPK yang tersurat dalam Standar Pemeriksaan



Keuangan Negara. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut dan memberikan bekal untuk melaksanakan pemeriksaan atas bantuan gempa bumi, Sub Bagian SDM, Hukum, dan Humas mengadakan Inhouse Training Pemeriksaan atas pengelolaan bantuan paska gempa bumi fase rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi DIY.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari mulai Senin (22/6) hingga Jumat (26/6) ini diikuti oleh 40 auditor. Bertempat di ruang kelas Balai Diklat lantai II, acara ini menghadirkan pembicara dari Staf Ahli Gubernur DIY, Dinas PU Provinsi

INHOUSE TRAINING PEMERIKSAAN ATAS BANTUAN GEMPA BUMI

DIY, serta Dinas PU Kabupaten Bantul yang menyampaikan materi seputar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY, Dasar Hukum, Organisasi dan sumber dananya. Selain itu, diundang pula pembicara dari Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS).



Untuk lebih memperdalam materi, Auditor Senior, **Thohir Hamzah** dan **Sutarno, BBA** juga sharing pengalaman tentang pemeriksaan atas bangunan, jalan, dan jembatan. Kemudian **Kukuh Pambudi, SE** juga berbagi teknik wawancara dan memperoleh bukti audit (Investigatif). Sedangkan Kepala Sub Auditorat, **Nelson Humiras HS, SE,M.Acc,CFE** dan Kepala Seksi DIY II, **Riyanto, SE,Ak** menjadi pembicara terakhir dalam Inhouse Training ini dengan pembahasan tentang tujuan dan program audit gempa. (gk)

RENUNGAN!!!

Anda sering datang telat atau pulang cepat? Kadangkala ada yang menganggap hal ini sesuatu yang wajar. Tidakkah itu termasuk korupsi?, meski kayaknya kecil – kecilan, ternyata kalo dikalkulasi, jumlahnya sangat fantastis. Masa sih?

Mari kita berhitung! Misalnya, menurut aturan kantor masuk jam 07.30 pagi pulang jam 17.00 sore (8,5 jam kerja sehari). Asumsikan ada pegawai yang korupsi waktu 1 jam dalam sehari, misalnya masuknya jam 08.30. Hal itu dilakukan setiap hari selama

setahun. Jadi ada sekitar 365 jam yang terbuang. Oke, anggaplah dalam setahun pegawai kerja cuma 242 hari karena dipotong hari libur dan hari besar, maka ada sekitar 242 jam kerja yang dikorupsi oleh seorang pegawai dalam setahun. Anggaplah sebulan pegawai digaji 2 juta, atau setara 11.765 rupiah/jam (perhitungan 20 hari kerja sebulan dan 8,5 jam sehari). Maka dalam setahun negara dirugikan sebanyak Rp 2.847.130,- (242 jam x 1 orang x Rp 11.765)

Itu baru satu orang yang ngaret. Coba misalnya yang ngaret macam itu ada 1000 orang, maka sudah dipastikan negara dirugikan secara efisiensi sebanyak lebih dari 2

Miliar rupiah selama setahun!!

- Bagaimana jika yang suka terlambat > 1000 orang?

POJOK AL-IKHLASH

- Bagaimana jika gaji yang diterima > 2 juta?
- Bagaimana jika waktu “terlambat” > 1jam?
- Bagaimana juga jika yang di kantor hanya ketika waktu “absen pagi” dan “absen sore” saja?

Selamat berhitung!!!

Suatu jumlah yang sangat besar, bukan? Jadi, jangan pernah menyepelekan apa yang namanya korupsi waktu ato ngaret.

Mari kita renungkan bersama.....karena setiap langkah yang kita lakukan, setiap detik waktu yang kita arungi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT!

Wallaahualam bishshowab!!

GALERI FOTO

Kepala Perwakilan menyerahkan LHP LKPD TA 2008 kepada Gubernur DIY, Hamengkubuwono X



Kepala Perwakilan, Sumardi bersama Bupati Bantul, Idham Samawi



Kasie DIY II, Riyanto berpasangan dengan Satrio Heru

**PERTANDINGAN PERSAHABATAN
BPK PROV. DIY VS BANTUL**

Perwakilan Provinsi DIY mengadakan pertandingan persahabatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Sabtu (20/6). Dua cabang olahraga dipertandingkan dalam acara ini, Tenis Lapangan dan Tenis Meja. Tim BPK yang di komandoi langsung Kepala Perwakilan, Sumardi disambut oleh Bupati Bantul, Idham Samawi beserta segenap jajaran muspida di Lapangan Tenis Madukismo, Bantul.

Partai pembuka antara Sumardi yang berpasangan dengan Rachmadiman harus mengakui keunggulan pasangan Idham Samawi/Eko Wahono dengan skor 6:8. Hingga partai keenam tim BPK belum mampu mengimbangi permainan Tim Pemda Bantul yang diperkuat beberapa pemain pelatda.

**SELAMAT BERBAHAGIA
ATAS KELAHIRAN**

“Rafa Afrizal Faiz”
Anak II Risni Marwati
(13 April 2009)

“Satya Tulus Ati Pamungkas Budi”
Anak III dari Emiliana Anom, SH
(9 Juni 2009)

Semoga Jadi anak berbakti pada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara



Pengarah : Sumardi, SH, Penanggungjawab: Edy Suyatno, SE.,MM,

Pemred: Sandra Nursantie,SH

Tim Redaksi: Emiliana Anom (An), Indrasworo W (IWe), Agnes Pembriani (Ap), Nurochman (gk), M. Iqbal (Mq)

Alamat Redaksi: :Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta

*****www.wallpaperdiy.multiply.com*****wallpaper.diy@gmail.com*****